

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa Arab Spring membawa babak baru dalam dunia perpolitikan di Timur Tengah. Peristiwa ini membawa gelombang demokratisasi di wilayah Timur Tengah yang merupakan sebuah wilayah yang dikuasai rezim-rezim diktator yang berkuasa puluhan tahun. Dipicu oleh aksi bakar diri Mohamed Bouazizi - seorang pedagang sayuran di Sidi Bouzid Tunisia - massa di seantero Tunisia bangkit menggulingkan rezim. Hanya dalam tempo 28 hari, tepatnya pada 14 Januari 2011, Presiden Ben Ali mengakhiri 23 tahun kekuasaannya dengan melarikan diri ke Arab Saudi. Aksi ini dengan cepat menjalar ke negeri-negeri Arab lainnya yang sudah lelah dengan pemerintah diktator mereka¹.

Terinspirasi dari Tunisia, rakyat Mesir melakukan protes besar-besaran untuk menumbangkan rezim Husni Mubarak yang sudah berkuasa 30 tahun². Aksi protes yang diawali pada tanggal 25 Januari 2011 tersebut berubah menjadi protes massal di seluruh Mesir dalam 18 hari. Husni Mubarak mengupayakan segala daya untuk mengambil kembali hati rakyat Mesir hingga akhirnya mengerahkan aparat keamanan termasuk militer. Hal tersebut menjadikan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan tidak dapat terelakan dan membuat korban terus berjatuhan. Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 Husni Mubarak resmi mengundurkan diri.

¹<http://liputanislam.com/analisis/as-dan-konstelasi-politik-tunisia/> diakses tanggal 19 Juni 2015

²Trias Kuncayono, *Musim semi di Suriah*. Jakarta : Kompas Media Indoneisa, 2013. Hal 439

Revolusi di tanah Arab mulai merebak ke Libya setelah empat hari tergulingnya Husni Mubarak. Protes bermula pada 15 februari 2011 untuk memaksa rezim Muammar Gadhafi untuk mundur dari jabatannya. Penolakan Gadhafi terhadap tuntutan rakyat Libya menimbulkan perang saudara. Rezim Gadhafi pun tumbang setelah Gadhafi terbunuh oleh pasukan oposisi 20 oktober 2011³, Pemimpin Besar Revolusi Rakyat yang telah memimpin Libya selama 42 tahun (1969-2011) akhirnya tewas dengan cara tragis setelah ditembak kepala dan kedua kakinya⁴.

Isu-isu kebangkitan rakyat Timur Tengah untuk mendapatkan hak dan kebebasan juga mempengaruhi rakyat Syiria. Gelombang protes muncul diawali oleh sejumlah anak muda yang mencoret dinding sekolah dengan tulisan “*As-Shaab Yurid Iskaat el Nizam!* (Rakyat Mau menjatuhkan Rejim)”. Gelombang protes ini masih terus berlanjut dan menjadi perang saudara yang telah memakan banyak korban.

Gelombang protes atau gelombang demokratisasi yang oleh beberapa pakar disebut Arab Spring tidak menjadikan wilayah Timur Tengah lebih baik dan aman. Arab Spring menjadikan keamanan wilayah Timur Tengah menjadi tidak stabil dan mengancam keamanan setiap Negara di wilayah tersebut. Hal tersebut Sesuai dengan apa yang diyakini kaum realis bahwa pentas politik internasional berada dalam kondisi anarkis⁵.

³<http://edition.cnn.com/2013/09/20/world/libya-civil-war-fast-facts> diakses tanggal 20 juni 2015

⁴ Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa 2014. Hal 171

⁵ Hans J. Morgenthau. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta : YOI, 1990. Hal 13

Gelombang arab spring⁶ yang melanda Negara-negara Timur Tengah juga masuk ke Negara Yaman, gelombang ini mendorong rakyat Yaman untuk memprotes presiden Ali Abdullah Saleh untuk mundur dari jabatannya. Ali Abdullah Saleh adalah presiden Yaman utara atau yang disebut Republik Rakyat Yaman dan menjadi presiden republik Yaman ketika Yaman utara dan Yaman selatan atau yang disebut Republik Demokratik Rakyat Yaman bersatu pada tahun 1990 dan menduduki jabatan presiden selama 30 tahun. Protes-protes yang terjadi menimbulkan banyak korban jiwa. Sampai Presiden Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatan, korban jiwa dari warga sipil telah mencapai 2.000 orang lebih⁷. Protes yang dilakukan oleh rakyat Yaman terhadap presidennya dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang diambil Ali Abdullah Saleh, Ali Abdullah Saleh berusaha mengusulkan amandemen konstitusi yang membuatnya agar tetap langgeng berkuasa. Terlebih Rezim Ali Abdullah Saleh tidak mampu mensejahterakan rakyat Yaman. Kemiskinan yang meningkat di kalangan rakyat produktif, kurangnya kebebasan berpolitik, korupsi tinggi, angka pengangguran mencapai 40%⁸.

Dilain pihak, rakyat Yaman juga terdorong karena stabilitas keamanan di Yaman yang tidak stabil. Pemberontakan dilakukan oleh kelompok Al Qaeda Semenanjung Arab (AQAP) di wilayah Yaman selatan, wilayah yang dulunya

⁶ "Arab Spring jika diartikan secara literatul bermakna pemberontakan arab, namun secara istilah ada pendapat yang mengatakan bahwa arab sping adalah isitalah kebangkitan dunia arab atau pemberontakan yang dimulai di Tunisia pada musim semi, desember 2010". M Agastya ABM, Arab Spring "badai revolusi timur tengah yang penuh darah". Yogyakarta : IRCisoD, 2013.Hal. 10
⁷<http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-Yaman-hingga-kini> diakses pada tanggal 19 juni 2015

⁸<http://news.detik.com/kolom/2871698/konflik-Yaman-multi-aspek-dan-multi-dampak> diakses tanggal 19 juni 2015

dipengaruhi oleh komunis yang sekarang dijadikan basis pergerakan kelompok ini. Serangan Al Qaeda diarahkan ke instansi milik AS di Yaman. Yaman Selatan pun bergejolak. Yaman bersumpah memerangi Al Qaeda karena mulai mengacak-acak wilayahnya. Dana dari AS pun untuk menanggulangi Al Qaeda di Yaman mengalir & meningkat tajam, dari sebelumnya 70 Juta USD naik 150 juta USD pada 2011.⁹ Amerika Serikat menjadikan suntikan dana tersebut sebagai hibah terhadap Yaman. Selain itu di wilayah Yaman Utara kelompok Syi'ah Houthi juga melakukan pemberontakan untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Ali Abdullah Saleh mencoba meredam gelombang protes dengan menyatakan tidak akan maju menjadi presiden lagi dan akan turun di tahun 2013. Namun usaha ini tidak berhasil karena rakyat Yaman tetap menuntut Ali Abdullah Saleh untuk turun dari jabatannya. Semua meneriakkan slogan *Ash-sha`b yurid isqat an-nizam* (Rakyat ingin menumbangkan rezim ini). *Yaumul Ghadab* atau Hari Kemarahan dihadiri 1 juta massa dengan tuntutan lengsernya Ali Abdullah Saleh dari kursi Presiden yang ia duduki 30 tahun lebih¹⁰. Hingga pada akhirnya Ali Abdullah Saleh menjadi korban pengeboman, nyawanya masih tertolong dan dilarikan ke Arab Saudi untuk mendapatkan pengobatan. Hal ini membuat rakyat Yaman bersuka cita dan menolak Ali Abdullah Saleh untuk kembali ke Yaman. Setahun kemudian atau tanggal 24 februari 2012 Ali Abdullah Saleh menyerahkan jabatan presiden dibawah tekanan Arab Saudi, pihak oposisi menunjuk wakilnya Abd Rabbuh Mansur Al Hadi menduduki jabatan presiden.

⁹<http://www.muslimedianews.com/2014/11/sejarah-konflik-Yaman-hingga-konflik.html> diakses tanggal 19 juni 2015

¹⁰<http://duniatimeng.com/Yaman-di-pusaran-badai-konflik-kawasan/> diakses tanggal 19 juni 2015

Abd Rabbuh Mansur Al Hadi menghadapi tantangan yang sangat besar untuk mengembalikan perekonomian Yaman serta stabilitas keamanannya. Berbagai hal dilakukan seperti menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa revolusi dan lainnya termasuk pemulihan stabilitas keamanan dengan pengerahan pasukan untuk mengatasi kelompok terror dan pemberontak. Namun keadaan tidak berjalan seperti yang diinginkan, kelompok Houthi melakukan pemberontakan dan mencoba mengambil alih pemerintahan. Milisi Houthi, yang berjuang untuk mendapatkan peningkatan otonomi di Provinsi Saada, telah melancarkan pemberontakan secara berkala sejak 2004 lalu. Namun, aksi mereka yang paling signifikan terjadi sejak Juli 2014 lalu. Kelompok Houthi mampu mengalahkan kelompok milisi dan suku lainnya yang disokong Partai Sunni Islah, selagi menerobos ke wilayah barat dan tengah negeri. Puncaknya berlangsung bulan Januari 2015 ketika mereka mampu menguasai Ibu Kota Sanaa, menyandera staf kepresidenan, dan menembaki kediaman Presiden Hadi¹¹. Berbagai usaha dan kesepakatan tidak berjalan baik termasuk gencatan senjata dan perjanjian damai. Tanggal 23 Januari 2015 presiden Abd Rabbuh Mansur Al Hadi dan perdana menteri Khaled Baha menyatakan mengundurkan diri. Abd Rabbuh Mansur Al Hadi kemudian melarikan diri ke Arab Saudi untuk mencari keamanan dan meminta bantuan.

Seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan di wilayah Timur Tengah, pemimpin Negara-negara di Timur Tengah sepakat untuk membentuk

¹¹http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150124_Yaman_Houthi_protes diakses tanggal 20 Juni 2015

koalisi. Hal ini diumumkan pada puncak pertemuan para pemimpin arab di Sharm el-Sheikh, mesir pada maret 2015¹². Beberapa Negara tergabung dalam koalisi ini seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordania, Maroko, Sudan dan Pakistan. Arab Saudi memimpin Negara-negara Arab yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Negara-Negara Arab Teluk (GCC) melancarkan operasi militer di Yaman terhadap pemberontak Syiah Houthi Kamis 26 maret 15, Arab Saudi melancarkan operasi militer udara bersandi '*Decisive Storm*'. Operasi ini diputuskan Raja Saudi yang baru, Salman bin Abdul Aziz Al Saud bersama dengan negara-negara teluk lain, setelah perkembangan mutakhir di Yaman yang semakin tak terkendali, sejak Ibu Kota Sanaa telah dikuasai milisi Syiah Houthi¹³.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan dukungnya terhadap operasi yang dilakukan Arab Saudi dan koalisinya melalui salah seorang pejabat gedung putih yang diumumkan sehari setelah operasi dijalankan¹⁴. Dalam mendukung koalisi Arab dalam memberantas pemberontak Houthi, Amerika Serikat kian menunjukkan keseriusannya. Satu hari setelah kampanye udara "*Desicive Storm*" yang dipimpin Arab Saudi diluncurkan pada 26 Maret, Pentagon mengumumkan perluasan perannya dengan memberikan Arab Saudi bom, pengisian bahan bakar udara, dukungan logistik, dan intelejen termasuk *live feed* dari penerbangan pengintaian untuk membantu Arab Saudi memutuskan apa dan di mana untuk mengebom. Selain itu, Amerika Serikat telah

¹²<http://www.koran-sindo.com/read/982901/149/pemimpin-arab-sepakat-bentuk-koalisi-militer-di-timur-tengah-1427686059> diakses tanggal 21 juni 2015

¹³<http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/03/26/67368/saudi-pimpin-koalisi-negara-arab-serang-pemberontak-syiah-Yaman.html> diakses tanggal 21 juni 2015.

¹⁴<http://www.eramuslim.com/berita/dukung-koalisi-regional-arab-amerika-serikat-ijinkan-bantuan-logistik-ke-arab-saudi.htm> diakses tanggal 21 juni 2015.

melengkapi Arab Saudi dengan miliaran dolar persenjataan, termasuk bom dan jet tempur¹⁵.

Kemudian Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bahwa pengiriman persenjataan dipercepat. Tak hanya urusan persenjataan, kerja sama antar mereka juga semakin dipererat dalam bidang pertukaran informasi intelijen dan unit perencanaan bersama. Hal itu telah disampaikan pada hari Selasa 7 April 2015 oleh Wakil menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, di Kota Saudi, Riyadh¹⁶.

kasus ini menjadi sangat unik dengan adanya dukungan Amerika Serikat terhadap koalisi yang dibentuk oleh Arab Saudi untuk memerangi pemberontak yang menjatuhkan kepemimpinan Yaman yang sudah berkuasa sejak Yaman utara dan Yaman selatan bersatu. Amerika Serikat merupakan Negara adidaya yang terus menggaungkan demokrasi ke seluruh penjuru dunia, bahkan Amerika Serikat mengklaim dirinya sebagai *Champion of Democracy* dan *the Guardian of Democracy*¹⁷. Amerika Serikat selalu menentang keberadaan penguasa-penguasa diktator yang berkuasa puluhan tahun, mengendalikan Negara dengan kekuatan militer dan bahkan Amerika Serikat menuduh mereka memimpin dengan tangan besi. Amerika Serikat selalu mendorong masyarakat internasional untuk melawan penguasa yang diktator dan mendapatkan hak-hak mereka (demokrasi). Lebih dari itu Amerika Serikat mendukung setiap rakyat yang ingin menumbangkan

¹⁵ <http://www.motherjones.com/politics/2015/07/saudi-arabia-yemen-civilian-casualties> diakses tanggal 23 oktober 2015

¹⁶ <http://lintaspos.com/koalisi-arab-perangi-Houthi-amerika-serikat-kirimkan-bantuan-persenjataan-19478/> diakses tanggal 21 juni 2015.

¹⁷ Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, 2000 hal 1

pemimpinnya yang diktator dan telah berkuasa penuh puluhan tahun dengan dukungan moral, finansial, dan bahkan dukungan militer. Dukungan-dukkungan ini bisa kita dapatkan ketika rakyat mesir ingin menumbangkan presidennya Husni Mubarak yang sudah berkuasa 30 tahun, begitu pula rakyat Libya yang menumbangkan Muammar Ghadafi dan Saddam Hussein di Iraq. Bahkan saat ini Amerika Serikat masih terus member bantuan kepada oposisi yang ingin menjatuhkan Bashar Asad di Syiria. Selain itu Amerika Serikat terus mengecam Negara yang tidak menerapkan demokrasi seperti di Korea Utara, Iran dan lainnya.

Kelompok Houthi merupakan kelompok oposisi yang dibentuk oleh rakyat Yaman untuk meminta hak-hak mereka sebagai rakyat dan ingin menumbangkan kepemimpinan yang diktator yang telah berkuasa puluhan tahun. Kelompok ini akhirnya berhasil memaksa presiden Ali Abdullah Saleh untuk mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya. Namun karena wakilnya yaitu Abd Rabbuh Mansur Al Hadi tidak mampu mewujudkan tuntutan mereka sehingga mereka juga memaksanya untuk mundur.

Dari keadaan yang seperti ini seharusnya Amerika Serikat mendukung penuh kelompok oposisi (Houthi) yang memaksa penguasa yang diktator untuk mundur. Namun pada kenyataannya Amerika Serikat menentang pemberontakan dan mendukung pembasmian pemberontakan oleh koalisi yang dibentuk Arab Saudi. Latar belakang inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk menjadikannya bahasan dalam tulisan akhir ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu “ mengapa Amerika Serikat mendukung koalisi Arab Saudi dalam memerangi pemberontakan Houthi di Yaman ? “

C. Kerangka Pemikiran

Dalam masalah yang akan diangkat, penulis akan menggunakan Teori yang sesuai dengan fenomena Hubungan Internasional yaitu Neo-Realisme. Neorealisme adalah teori hubungan internasional yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979). Teori ini mendominasi diskusi teori Hubungan Internasional selama kuartal terakhir abad kedua puluh sebagaimana teori realisme versi Morgenthau (1948) mendominasi diskusi selama periode antara 1950 dan 1975¹⁸. Dia mengemukakan teori kaum realis yang sangat berbeda yang diilhami oleh ambisi ilmiah behavioralisme. Waltz berusaha untuk merumuskan pernyataan serupa hukum tentang hubungan internasional yang mencapai keabsahan ilmiah. Oleh karena itu, ia berangkat secara berbeda dari realisme klasik dalam menunjukkan benar-benar tidak adanya kepentingan dalam etika kenegaraan atau dilema moral dalam kebijakan luar negeri menyangkut bukti kuat tulisan realis Morgenthau¹⁹.

¹⁸ Walter Carlsnaes, Thomas rise dan Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung, Penerbit Nusa Media 2014. Hal 374

¹⁹Robert Jackson dan Georg Sorenson, *pengantar Hubungan Internasional, Teori dan pendekatan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2013. Hal 82

Kenneth Waltz memiliki tiga karakteristik membahas politik internasional. pertama, Ordering Principle Of System atau prinsip pengorganisasian sistem. Menurut Waltz politik internasional memiliki prinsip anarkis dan berbeda dengan politik domestik yang hirarkhis yang ia tulis Domestic politic is hierarchically ordered. Lalu karakter kedua, the character of units atau karakter unit. Dan ketiga, the distribution of capabilities atau distribusi kapabilitas. Karakter unit sistem mengacu pada fungsi yang dijalankan unit-unit dalam sistem (negara)²⁰.

Fokus Waltz adalah pada struktur sistem internasional dan konsekuensi struktur tersebut bagi hubungan internasional. Konsep struktur itu dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Waltz mencatat bahwa sistem internasional adalah anarki; tidak ada pemerintahan dunia. Kedua, sistem internasional terdiri dari serupa unit: setiap Negara, besar atau kecil harus menjalankan serangkaian fungsi pemerintah yang serupa seperti pertahanan nasional, pengumpulan pajak, dan peraturan ekonomi. Dengan demikian, ada satu hal di mana Negara-negara berbeda dan bahkan berbeda jauh: dalam kekuatannya apa yang disebut Waltz sebagai kapabilitas relatifnya. Kemudian Waltz melukiskan gambaran sistem internasional yang sangat pelit dan abstrak dengan sangat sedikit elemen. Dengan demikian hubungan internasional merupakan anarki yang terdiri dari Negara-negara yang beragam dan hanya berbeda dalam satu hal penting; kekuatan

²⁰ Lihat Kenneth N Waltz, *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company. Hal 88

relatifnya. Anarki mungkin bertahan, menurut Waltz, sebagai sebab Negara-negara ingin memelihara otonominya²¹.

Realisme struktural atau neorealisme, yang mana menjelaskan pola peristiwa internasional dalam terminologi struktur sistem yang memodifikasi versi realisme. Dalam perbandingan terhadap realis klasik, bagi neorealis, kemampuan dalam struktur internasional merupakan faktor yang penting dari tingkah laku Negara. Bagi mereka, bukanlah sifat manusia yang menentukan tingkah laku Negara tetapi sistem internasional yang anarki yang menciptakan kebencian, kecemburuan, rasa takut, kecurigaan dan kegelisahan. Konflik dapat terjadi walaupun satu Negara memiliki maksud yang baik terhadap Negara lain karena struktur atau arsitektur dari sistem internasional mendorong Negara untuk mendapatkan kekuasaan, tidak peduli sistem politik dan budaya apa yang Negara tersebut miliki. Pada dasarnya, neorealis setuju dengan pandangan bahwa politik internasional pada pokoknya adalah perebutan kekuasaan, tapi betul-betul meragukan pandangan bahwa perebutan kekuasaan adalah konsekuensi dari sifat manusia²².

Dalam menjelaskan tingkah laku Negara dalam hubungan internasional, neorealis melihat pentingnya struktur atau lebih tepatnya pembagian kekuasaan antar Negara besar dalam struktur politik internasional. Menurut neorealis, polaritas dari pembagian kekuasaan internasional mengarah ke beberapa sentral

²¹Robert Jackson dan Georg Sorenson, *pengantar Hubungan Internasional, Teori dan pendekatan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2013. Hal 83

²²Mohd Azizuddin Mohd Sani dan Knocks Tapiwa zengeni, *International Relations*. Kuala Lumpur, Pearson Malaysia Sdn Bhd, 2014. Hal 9

kekuasaan yang independen dalam sistem. bentuk dari perbedaan sistem politik dunia (pembagian kekuasaan dalam sistem internasional) disebut sebagai multipolar, bipolar dan unipolar. Oleh karena itu memaksa untuk mengikuti struktur. Sebagai contoh dalam sistem bipolar semasa perang dingin, Negara memiliki pilihan yang terbatas yaitu bergabung dengan blok barat atau blok soviet. Bagaimanapun, pilihan lain bagi Negara adalah tidak bergabung dengan salah satu blok dari dua blok yang berselisih dengan bergabung dengan Gerakan Nonblok²³.

Sistem internasional yang muncul setelah perang dunia kedua didominasi oleh dua super power, Amerika Serikat dan Uni Soviet: yaitu sistem bipolar kehancuran Uni Soviet mengakibatkan suatu sistem yang berbeda dengan beberapa Negara berkekuatan besar, tetapi dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang paling dominan dalam sistem tersebut: yaitu bergerak menuju sistem multipolar. Waltz tidak menyatakan bagian kecil informasi tentang struktur sistem internasional ini dapat menjelaskan segala sesuatu tentang politik internasional. Namun, dia percaya bahwa mereka dapat menjelaskan sesuatu yang besar dan penting. Apakah mereka itu ? pertama, Negara-negara berkekuatan besar akan cenderung menyeimbangkan satu sama lain. Dengan hilangnya Uni Soviet, Amerika Serikat mendominasi sistem tersebut. Akan tetapi, teori perimbangan kekuatan menyebabkan seseorang memprediksi bahwa Negara-negara lain akan berusaha mengiringi kekuatan Amerika menjadi seimbang. Kedua, Negara-negara berkekuatan kecil dan lemah akan memiliki kecenderungan

²³Ibid,hal 11

mengaliansikan dirinya dengan Negara-negara berkekuatan besar agar dapat mempertahankan otonomi maksimumnya. Dalam membuat argument ini Waltz berangkat secara berbeda dari argument kaum realis klasik yang mendasarkan diri pada sifat manusia yang dipandang sangat buruk dan karenanya mengarah pada konflik dan konfrontasi. Bagi Waltz, Negara-negara adalah pencari kekuasaan dan sadar keamanan bukan disebabkan oleh manusia, tetapi lebih disebabkan karena struktur sistem internasional yang mendorong mereka melakukan demikian²⁴.

Pendekatan Neorealisme yang dikemukakan Waltz memiliki beberapa perbedaan dengan realisme yang dikemukakan Morgenthau (Realisme Klasik). Pertama, Realisme menyandarkan pada penjelasan yang bersifat induktif (*Inductive Theory*). Analisis atas apa terjadi dalam suatu Negara, misalnya uji coba nuklir India dan Pakistan harus dipahami dalam kerangka pengaruh pimpinan militer di kedua Negara dan perbedaan-perbedaan sebagai akibat kedekatan geografis mereka. Semua penjelasan ini berangkat dari unit-unit analisis atau suatu model penjelasan yang bersifat *bottom-up*. Neorealis di sisi lain, tidak menolak penjelasan unit-unit ini, tetapi mereka yakin bahwa struktur harus dipertimbangkan dalam menganalisis politik internasional²⁵.

Perbedaan kedua adalah pandangan mereka terhadap kekuasaan. Meskipun kaum realis memahami elemen-elemen kekuasaan yang berbeda (sumber daya ekonomi dan teknologi, misalnya), tetapi mereka menganggap bahwa kekuatan militer sebagai yang paling utama. Sebaliknya, kaum neorealis beranggapan

²⁴ Robert Jackson dan Georg Sorenson, *pengantar Hubungan Internasional, Teori dan pendekatan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2013. Hal 83

²⁵ Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta, CAPS 2011. Hal 105

bahwa kekuatan militer bukan satu-satunya yang esensial. Ole karena itu, dalam pandangan kaum neorealis, kekuasaan (power) lebih dari pada akumulasi sumber-sumber militer dan kemampuan untuk menggunakannya untuk memaksa dan mengontrol Negara lain, tetapi merupakan kombinasi kapabilitas Negara. Negara dalam hal ini, dibedakan dalam sistem berdasarkan kekuasaan mereka dan bukan oleh fungsi. Kekuasaan memberikan posisi suatu Negara dalam sistem internasional dan menentukan perilaku mereka²⁶.

Perbedaan ketiga terletak pada bagaimana Negara bereaksi dalam sistem dunia yang bersifat anarkis. Bagi kaum realis, anarki adalah kondisi sistem internasional dan Negara bereaksi berdasarkan atas ukuran, lokasi, politik dalam negeri (*domestic politics*) dan kualitas kepemimpinan. Sebaliknya, neorealis melihat bahwa anarki menentukan sistem. Menurut neorealis, semua Negara secara fungsional merupakan unit-unit yang sejenis, dalam arti bahwa mereka mempunyai pengalaman yang sama yang berasal dari batas-batas yang ditimbulkan oleh sistem dan terus berusaha mempertahankan posisi mereka dalam suatu sistem. Oleh karena itu, masing-masing Negara akan bereaksi atas sistem tersebut melalui kebijakan luar negeri dalam cara yang disesuaikan dengan kekuasaan dan kapabilitas mereka²⁷.

Varian lain dari neorealis yang mungkin sangat bermanfaat dalam menjelaskan tren kerjasama regional adalah relatif dan absolute *gains* yang dikembangkan oleh Joseph Grieco (1988). Grieco mengklaim bahwa Negara

²⁶ Ibid, hal 106

²⁷ Ibid, hal 107

tertarik untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka, kemudian akan bekerja sama dengan Negara lain atau aktor lain. Meskipun demikian, mereka juga melihat bagaimana Negara juga menaruh perhatian atas kekuasaan dan pengaruh yang mungkin didapatkan oleh suatu Negara dalam banyak capaian-capaian kerja sama yang mereka lakukan²⁸.

Menurut John Mearsheimer dalam esai yang didiskusikan secara luas, ia membahas argumen neoralis Waltz dan memakainya baik pada masa lalu maupun masa depan. Ia menyatakan bahwa neorealis masih relevan untuk menjelaskan hubungan internasional; neorealis adalah teori umum yang dipakai pada situasi sejarah lain di samping Perang Dingin. Dia juga berpendapat bahwa neoralisme dapat digunakan untuk memprediksi jalannya sejarah internasional setelah Perang Dingin²⁹.

Dalam keadaan pikiran yang sama seperti Waltz, Mearsheimer menganggap perilaku Negara-negara terbentuk jika tidak ditentukan oleh struktur anarki hubungan internasional. Namun, dia berbeda dari Waltz, yang karakternya sebagai 'realis defensif' yaitu seseorang yang mengenali bahwa Negara-negara harus dan jelas berusaha untuk menjadi aman dan bertahan hidup, tetapi yang percaya bahwa kekuatan yang berlebihan bersifat kontra produktif, karena menimbulkan aliansi yang bermusuhan dengan dengan Negara-negara lain. Oleh karena itu, bagi Waltz tidak masuk akal untuk menuntut kekuatan berlebihan di

²⁸ Ibid, hal 108

²⁹ Robert Jackson dan Georg Sorenson, *pengantar Hubungan Internasional, Teori dan pendekatan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2013. Hal 143

luar yang diperlukan bagi keamanan dan pertahanan hidup. Mearsheimer menyebut teori Waltz sebagai ‘realisme deensif’³⁰.

“Offensive realists argue that states should always be looking for opportunities to gain more power and should do so whenever it seems feasible. States should maximize power, and their ultimate goal should be hegemony, because that is the best way to guarantee survival”³¹.

Mearsheimer sependapat dengan Waltz bahwa anarki memaksa Negara-negara untuk bersaing demi kekuatan. Namun, ia berpendapat bahwa Negara-negara mencari hegemoni, bahwa mereka pada akhirnya lebih agresif daripada yang digambarkan Waltz³². Menurutnya juga, semua Negara ingin untuk menjadi hegemon regional. Inilah mengapa ia menyebut teorinya sebagai ‘realisme ofensif’, yang mendasarkan asumsinya bahwa kekuatan besar selalu mencari peluang untuk mendapatkan kekuatan melebihi pesaingnya, dengan hegemoni sebagai cita-cita akhirnya³³.

Menurut Antonio Gramsci, hegemoni adalah dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga apa yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap yang didominasi dianggap suatu hal yang wajar. Kelompok yang dimaksud Gramsci juga bisa diartikan sebagai sebuah Negara. Negara akan berusaha mempengaruhi Negara lainnya yang kemudian pada tujuan akhirnya adalah hegemoni terhadap Negara tersebut dan bahkan dengan cara yang persuasif (kekerasan).

³⁰ Ibid, hal 145

³¹ John J Mearsheimer, *Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War*, dalam S. Lyne-Jones (editor), *the Cold War and After: Prospect for Peace*. MA: Massachusetts Institute of technology press. Cambridge. Hal 74

³² Op cit, hal 146

³³ Ibid, hal 147

Tujuan seluruh Negara seperti Amerika Serikat adalah untuk mendominasi seluruh sistem, karena hanya dengan cara itu dapat meyakinkan bahwa tidak ada Negara lain atau gabungan Negara yang bahkan akan berpikir untuk berperang mealawan Amerika Serikat. Semua kekuatan besar berusaha keras untuk situasi yang ideal tersebut. Akan tetapi, planet ini terlalu besar untuk hegemoni global. Samudera adalah penghalang yang besar. Tidak ada Negara yang mempunyai kekuatan yang diperlukan³⁴.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mearsheimer, dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat selalu mencari peluang untuk mendapatkan kekuatan, termasuk pengaruhnya melebihi pesaingnya di suatu wilayah. Terlihat juga bahwa Negara-negara terlihat sangat agresif dalam mencari hegemoni di suatu wilayah sebagaimana koalisi Arab Saudi yang tidak menginginkan arah politik Negara Yaman berpindah sehingga melakukan tindakan militer.

Dalam aplikasi teori diatas dan kaitannya dengan kasus yang akan penulis bahas adalah, keadaan dunia yang tidak ada satu pemerintahan yang mengatur, mendorong Negara-negara berbuat anarki. Sehingga, Arab Saudi membentuk koalisi dengan beberapa Negara untuk melakukan penyerangan terhadap pemberontak Houthi di Yaman. Dalam skala lain, Negara-negara besar bebas memberikan dukungannya terhadap setiap masalah ataupun konflik dengan sepihak. Itu pula yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat dengan mudah mendukung Koalisi yang dibentuk Arab Saudi.

³⁴ Ibid, hal 146

Dalam kasus ini Amerika Serikat sebagai Negara besar memiliki kemampuan dan fasilitas mendorong koalisi Arab Saudi dengan bantuan persenjataan dan logistik dimana koalisi memiliki sumber daya manusia yang mencukupi yang mana Amerika Serikat tidak memilikinya. Dari sini terlihat kemampuan Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam tingkah lakunya dalam kancah internasional sebagaimana dijelaskan dalam pandangan neorealisme. Amerika Serikat memandang kekuatan militer bukanlah satu-satunya faktor untuk mempertahankan pengaruh sehingga Amerika Serikat tidak mengirimkan militernya untuk langsung memerangi pemberontakan namun mengambil langkah dukungan dengan memberikan bantuan persenjataan, logistik dan perutakran informasi.

Amerika Serikat tidak ingin pengaruhnya di wilayah Timur Tengah diambil alih oleh Negara lain dalam hal ini Iran sebagai pendukung utama kelompok pemberontak Houthi, begitu pula Iran yang ingin memperkuat pengaruhnya sehingga seimbang dengan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan bahwa Negara besar cenderung menyeimbangkan satu sama lain dan setiap Negara ingin menyeimbangi kekuatan besar seperti Amerika Serikat karena sistem internasional yang anarki.

Teori neorealis Waltz: Struktur dan Hasil³⁵

Struktur Internasional (Unit dan Hubungan Negara)	Hasil-Hasil Internasional (Efek persaingan Negara)
Anarki Internsional : Arab Saudi dan Amerika Serikat bebas mengambil tindakan.	Perimbangan kekuatan
Negara sebagai unit unit serupa : Negara-negara koalisi melakukan serangan dengan dukungan Negara besar (AS)	Pengulangan internasional
Kapabilitas Negara yang berbeda : Koalisi memiliki SDM. AS memiliki fasilitas dan logistik	Konflik internsional, perang
Hubungan Negara-negara berkekuatan besar	Perubahan Internasional

³⁵Robert Jackson dan Georg Sorenson, *pengantar Hubungan Internasional, Teori dan pendekatan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2013. Hal 137

D. Hipotesis

Untuk menjawab sementara latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis mengambil hipotesa sebagai berikut:

“Amerika Serikat mendukung Arab Saudi untuk membendung kekuatan Houthi yang didukung Iran dan Rusia agar tidak menguasai Negara, menyebarkan pengaruh dan mengalihkan orientasi politik Negara menjadi anti barat.”

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai gambaran umum penulisan yang penulis peroleh dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik sekunder adalah berupa surat kabar, artikel-artikel ilmiah, situs internet serta sumber-sumber valid dan relevan bagi penulis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat mutlak penulisan yang ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan atau bagaimana cara menyajikan hasil penelitian tersebut. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : latar belakang masalah, rumusan masalah, teori atau kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : membahas tentang deskripsi kelompok Houthi di Yaman, latar belakang pemberontakan dan tujuannya.

Bab III : membahas tentang sikap Negara-negara Timur Tengah dan reaksi internasional, pembentukan koalisi oleh Arab Saudi dengan beberapa Negara termasuk AS untuk membantu pemerintah Yaman mengatasi pemberontakan.

Bab IV : membahas tentang faktor-faktor yang membuat Amerika Serikat Mendukung koalisi Arab Saudi memerangi pemberontakan Houthi di Yaman.

Bab V : kesimpulan skripsi secara singkat.